

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut John W. Creswell tinjauan Pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan Pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Menurut Shavelson dan Towne, Menyusun sebuah tinjauan Pustaka sama halnya dengan mencari berbagai hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan Gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai sebuah penelitian (Mahanum, 2021).

Didalam tinjauan pustaka ini menjelaskan tinjauan literatur yang didasarkan pada kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Tinjauan pustaka ini akan dibahas dalam dua pembahasan, yang pertama yaitu membahas konsep dasar dari variabel yang diteliti, dan yang kedua akan membahas penelitian terdahulu.

2.1.1 Kemiskinan

Menurut Parwoto, kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menjalankan kehidupannya pada tingkat yang dianggap manusiawi (Laurens et al., 2024). Kondisi seperti ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, dan kasih sayang. Menurut Ala (1981) dalam Imanto (2020), kemiskinan bersifat multidimensi. Artinya karena kebutuhan manusia beragam, maka kemiskinan pun mempunyai banyak aspek. Dilihat dari

kebijakan umum, kemiskinan mencakup aspek utama dari aset masyarakat miskin, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan; dan aspek sekunder dari jaringan sosial, sumber daya keuangan, dan informasi yang buruk. Dimensi kemiskinan digambarkan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, layanan kesehatan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politis, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pemahaman terhadap sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok masyarakat dalam menggapai dan menggunakan sumber daya. Secara sosial, kemiskinan terlihat dari kurangnya informasi dan struktur sosial yang mendukung peluang peningkatan produktivitas.

Dengan demikian, kemiskinan dapat dicermati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum berpartisipasi dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi.

2.1.1.1 Jenis Kemiskinan

Chambers dalam Prasetya (2020) mengatakan kemiskinan merupakan suatu konsep terpadu yang mempunyai lima dimensi: 1) layak, 2) tidak berdaya, 3) keadaan darurat, 4) ketergantungan, dan 5) isolasi baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan tidak hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lainnya, seperti: kesehatan,

tingkat pendidikan yang rendah, perlakuan hukum yang tidak adil, kerentanan terhadap ancaman kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Menurut Chambers dalam Adawiyah (2020), kemiskinan dapat dibagi menjadi empat:

- 1) Kemiskinan absolut: ketika pendapatan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, pelayanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif : kondisi miskin akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan.
- 3) Kemiskinan budaya : merujuk pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, misalnya tidak mau berusaha memperbaiki taraf hidup, boros, malas, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural : keadaan kemiskinan yang disebabkan karena kurangnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, namun seringkali menimbulkan maraknya bentuk kemiskinan

2.1.1.2 Teori Kemiskinan

1. Teori Modernisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Michael P Todaro (2017), pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dalam Pembangunan, namun bukan satu-satunya indikator. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan efek positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan jika didukung oleh pemerataan distribusi pendapatan

dan akses terhadap peluang ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi sering kali tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dan memperparah kemiskinan.

Todaro dan Smith mengkritisi gagasan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menurunkan tingkat kemiskinan (*trickle-down effect*). Todaro dan Smith menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru memperbesar jurang ketimpangan antara kelompok miskin dan kaya, terutama jika tidak diiringi oleh kebijakan distribusi yang adil.

2. Teori kemiskinan absolut dan relatif

- Kemiskinan absolut (Seebom Rowntree 1901)

Rowntree melakukan penelitian pada Masyarakat di kota York, mencoba mengukur kemiskinan dengan menetapkan batas minimum kebutuhan dasar hidup yang dibutuhkan seseorang agar bisa bertahan hidup. Batas minimum ini mencakup makanan bergizi, pakaian, tempat tinggal yang layak, bahan bakar, dan pencahayaan.

Menurutnya, seseorang dikatakan miskin secara absolut bila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu, yang artinya hidupnya secara biologis dan social terancam. Namun kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa kemiskinan didefinisikan secara statis dan kontekstual, tanpa mempertimbangkan dinamika social dan perubahan standar hidup dalam masyarakat. Seperti, seseorang yang tidak kelaparan dan memiliki tempat tinggal belum tentu dikatakan “tidak miskin” jika tidak bisa mengakses pendidikan atau layanan kesehatan yang layak (Rowntree, 1901).

- Kemiskinan relatif (Peter Townsend 1979)

Menurut Peter Townsend, kemiskinan tidak hanya cukup diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan secara fisik tetapi harus dilihat dari segi kemampuan individu untuk hidup sesuai dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakatnya.

Townsend menyatakan bahwa seseorang hidup dalam kemiskinan apabila mereka tidak memiliki sumber daya untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya secara normal, yang menyebabkan mereka terisolasi dari kehidupan masyarakat umum. Dengan demikian, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan masalah ketimpangan sosial dan eksklusi sosial, di mana individu merasa tertinggal atau termarginalkan karena keterbatasan ekonomi.

Dalam pendekatan ini, seseorang bisa saja tidak dikategorikan miskin secara absolut, tetapi tetap dianggap miskin secara relatif jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata masyarakat, sehingga tidak mampu menjalani gaya hidup yang wajar menurut standar lingkungan sosialnya (Townsend, 1982).

3. Teori pendekatan kapabilitas

Amartya Sen memperkenalkan dua konsep kunci dalam pendapatnya, *functionings* dan *capabilities*. *Functionings* merujuk pada berbagai hal yang dapat dilakukan dan dicapai oleh seseorang dalam hidupnya, seperti menjadi sehat, berpendidikan, memiliki pekerjaan yang bermartabat, dan bisa berpartisipasi dalam masyarakat. *Capabilities* merupakan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mencapai *functionings* tersebut. Sen memandang kemiskinan sebagai bentuk ketidakbebasan, bukan hanya sekedar kekurangan uang. Jika seseorang tidak

miskin secara finansial, tetapi ia tidak memilih pekerjaan bermakna atau tidak bisa mengakses pendidikan, atau tidak memiliki kebebasan berpendapat, maka ia tetap hidup dalam kemiskinan dari sudut pandang kapabilitas. Pendekatan kapabilitas menolak ukuran tunggal seperti pendapatan untuk mengukur kesejahteraan. Sebagai gantinya, pendekatan ini mendorong penggunaan indikator multidimensional, seperti kesehatan, pendidikan, umur harapan hidup, partisipasi sosial, serta kualitas lingkungan hidup

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perekonomian, terutama dalam menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau wilayah. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Rindiyan & Abd. Mubaraq, 2023). Menurut Sukirno dalam Sriwahyuni (2020), istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan atau menilai pencapaian dalam perkembangan suatu perekonomian. Dalam analisis makroekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperoleh oleh suatu negara diukur berdasarkan perubahan pendapatan nasional riil yang dihasilkan oleh negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Isu ini menjadi perhatian utama dalam analisis ekonomi jangka panjang karena mencerminkan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fenomena ini sering disebut *Modern Economic*

Growth, yang menandakan perubahan struktural signifikan pada perekonomian, termasuk peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, serta pertumbuhan sektor industri dan jasa (Priyono dan Zainuddin Ismail, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, yang mencerminkan kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa secara lebih efektif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat seiring dengan bertambahnya alternatif konsumsi barang dan jasa yang tersedia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang konsisten biasanya diiringi oleh meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai standar hidup yang lebih baik (Kania Azzahra & Soebagyo, 2024).

2.1.2.1 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, antara lain Suparmoko (2000) dikutip dalam (Kurniawati et al., 2021)

1) Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun, yang dihitung dengan menggunakan harga pasar. PDB terdiri dari empat komponen utama, yaitu ekspor (X), impor (M), konsumsi rumah tangga (C), serta investasi domestik bruto yang mencakup pembentukan modal tetap dan perubahan stok dari sektor swasta dan pemerintah (Ib), serta konsumsi/pengeluaran pemerintah (G).

2) Pendapatan Per Kapita atau PDB Per Kapita

Pendapatan per kapita atau PDB per kapita adalah rasio antara jumlah PDB nasional dan jumlah penduduk, yang mencerminkan rata-rata pendapatan atau PDB per individu.

3) Pendapatan Per Jam Kerja

Salah satu cara terbaik untuk mengukur kemajuan ekonomi adalah dengan melihat pendapatan per jam kerja. Negara yang lebih maju biasanya memiliki pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain pada jenis pekerjaan yang sama.

4) Harapan Hidup Waktu Lahir

Harapan hidup pada saat kelahiran mencerminkan kualitas hidup, yang dapat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita yang tinggi, yang memungkinkan tercapainya standar hidup yang lebih baik dalam aspek kesehatan, perumahan, makan, dan sandang.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro, dalam teori pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikutip dalam (Eras Destian, 2022), ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, di antaranya adalah:

1) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian, yang dapat mendorong produksi barang dan jasa. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi, maka

akan menyebabkan tekanan pada ekonomi, seperti tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendapatan per kapita.

2) Akumulasi Modal

Akumulasi modal, baik dalam bentuk investasi fisik seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur, maupun investasi dalam pendidikan dan keterampilan, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Penambahan modal ini memungkinkan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi.

3) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Dengan adanya inovasi dan perkembangan teknologi, suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa dengan lebih sedikit sumber daya, sehingga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Teknologi juga membuka peluang baru dalam berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan layanan, yang mendorong diversifikasi ekonomi dan daya saing negara di pasar global.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan PP No.8/1981, Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, regional, dan subsektor. Dalam hal ini, upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada beberapa hal, yaitu kebutuhan hidup minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat inflasi, perluasan kesempatan kerja,

upah yang berlaku secara regional dan tingkat dari pembangunan ekonomi daerah. Berbagai faktor yang ada pada komponen KHM dinilai dengan harga yang berlaku untuk menghasilkan suatu tingkat upah. Karena harga antar daerah sangat bervariasi dan ada situasi lokal yang mungkin tidak berlaku secara nasional, maka tingkat upah minimum disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau lebih sering disebut dengan upah minimum provinsi/UMP (Qolbi, 2024)

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja agar dapat mencapai tingkat upah yang layak, artinya masyarakat yang bekerja akan memperoleh penghasilan yang layak untuk kehidupannya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja, terutama yang berketerampilan rendah. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diprediksi oleh teori ekonomi konvensional (Mudana & Purbadharmaja, 2024).

2.1.3.1 Manfaat dari Kebijakan Upah Minimum

Kebijakan upah minimum di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dengan adanya penetapan kebijakan upah minimum, hal ini tentu memberikan manfaat seperti:

- 1) Memberikan perlindungan kepada pekerja dari upah yang tidak adil dan eksploitasi, memastikan mereka menerima imbalan yang layak untuk pekerjaan yang dilakukan
- 2) Dengan adanya upah minimum, pekerja memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mana hal ini akan berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan

- 3) Membantu mengurangi angka kemiskinan, terutama di kalangan pekerja berpenghasilan rendah, dengan memberikan mereka akses pendapatan yang lebih baik
- 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa, karena pekerja dengan pendapatan tinggi cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk konsumsi.
- 5) Peningkatan kualitas hidup, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

2.1.3.2 Teori Upah Minimum

Dalam ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency-wage*). Teori ini adalah sebuah konsep dalam ekonomi tenaga kerja yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium pasar. Meskipun ada pasokan tenaga kerja yang bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah. Dengan kata lain, perusahaan secara rasional memilih untuk membayar upah yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa upah yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Alasan beberapa perusahaan memilih untuk membayar upah efisiensi seperti teori ini karena :

- 1) Upah yang tinggi membuat pekerja lebih enggan untuk meninggalkan pekerjaan mereka
- 2) Pekerja yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik cenderung akan lebih termotivasi, terlibat, dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Maka hal

ini akan meningkatkan produktivitas pekerja.

- 3) Upah yang tinggi lebih menarik pelamar yang lebih terampil dan berpengalaman.

Teori ini juga menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah efisiensi yang lebih banyak diterapkan dinegara-negara miskin, menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja yang dibayar dengan upah yang memadai akan memiliki lebih banyak nutrisi sehingga akan menciptakan para pekerja yang lebih sehat dan lebih produktif. Teori efisien upah ini menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah (Mahanum, 2021).

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.81/Pmk.05/2012, belanja bantuan sosial adalah transfer uang, barang, atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial dan meningkatkan kapasitas ekonomi serta kesejahteraan. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk belanja yang berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan uang yang dianggarkan untuk mendukung lembaga dan pemerintah guna mengurangi tingkat kemiskinan (Toni Triyulianto, Baiq Syafa Rizkia Nurvita, 2024).

Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan untuk memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan

sosial, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial guna mencapai kemandirian. Bentuk belanja bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial konsumtif, bantuan sosial produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu. Belanja bantuan sosial konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer layanan (L. Sari, 2022)

Pemerintah menyusun petunjuk pelaksanaan dan menetapkan pihak dan lembaga yang menjadi sasaran penerima bantuan serta menetapkan bentuk bantuan, baik berupa transfer langsung barang atau jasa, yang disalurkan langsung kepada penyalur yang ditunjuk sebelum menyalurkan bantuan sosial. Belanja bantuan sosial disalurkan dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan (Kumombong et al., 2022).

Menurut Rahmansyah (2020) tujuan pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015) Pasal 4 huruf a Nomor 254/PMK.05/2015 meliputi:

- a) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;

- b) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar;
- c) Jaminan sosial, yang merupakan suatu skema yang dilembagakan untuk menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak;
- d) Pemberdayaan sosial, yang merupakan segala upaya yang ditujukan agar warga masyarakat yang mengalami masalah sosial memiliki daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- e) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai sumber penghidupan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang layak bagi kemanusiaan;
- f) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko terkena bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.1.4.1 Teori Belanja Bantuan Sosial

Kondisi sejahtera biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai *“a condition or state of human well-*

being”. Kondisi sejahtera terjadi saat kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi. Kesejahteraan sosial dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu, kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Menurut Suharto kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Durham, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok dan komunitas. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan berjalan selaras dan harmonis sehingga menciptakan suasana yang sejahtera.

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan Pembangunan manusia (*human development*). Di Jepang, pemerintah memberikan perlindungan hidup (*seikatsu hogo*) kepada masyarakatnya. Sekaitsu hogo adalah jaminan perlindungan terhadap standar hidup

untuk semua warga Jepang dan tidak boleh ada diskriminasi, dan orang yang hidup miskin dapat menuntut pertolongan bantuan dari pemerintah. Menurut Okamura untuk dapat mengetahui dan memahami masalah kesejahteraan sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial lainnya diperlukan untuk mengetahui keadaan dari masalah sosial tersebut. Menurut Okamura terdapat lima karakteristik kesejahteraan sosial yaitu :

- 1) Tuntutan ekonomi yang stabil
- 2) Tuntutan pekerjaan yang layak
- 3) Tuntutan keluarga yang stabil
- 4) Tuntutan jaminan kesehatan
- 5) Tuntutan jaminan pendidikan

2.1.5 Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 tentang ketenagakerjaan, dilakukan siapa saja yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan diri sendiri dan masyarakat. Di Indonesia batasan umur minimal 10 tahun tanpa batasan umur maksimal. Pemilihan batasan umur 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka yang

telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka masih digolongkan sebagai tenaga kerja (E. J. Sari, 2022).

2.1.5.1 Asas Penempatan Tenaga Kerja

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Prinsip penempatan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Jadi, berdasarkan ketentuan ini jelas tidak boleh ada perlakuan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- 1) Terbuka; merupakan pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain, jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
- 2) Bebas; merupakan pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja sehingga tidak ada pemaksaan satu sama lain.
- 3) Objektif; merupakan pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepentingan pihak tertentu.

- 4) Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi; merupakan penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

2.1.5.2 Teori Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Solmon (1980) dalam GOOD (2015) menjelaskan, bahwa pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja dapat terjadi sebentar namun dapat juga memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak dipasar yaitu, setiap Perusahaan menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah. Sedangkan pencari kerja memiliki keahlian juga berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang berbeda-beda pula. Dimana letak masalah dari kedua belah pihak adalah keterbatasan informasi. Konsep utama dalam teori pasar tenaga kerja klasik yaitu :

- 1) Penawaran tenaga kerja adalah konsep ekonomi yang mengacu pada total jam kerja yang bersedia ditawarkan oleh semua individu dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat upah selama periode waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja ini dipengaruhi oleh upah, preferensi individu terhadap pekerjaan dan waktu luang, dan ukuran populasi yang mana semakin besar populasi usia kerja, maka semakin besar penawaran tenaga kerja
- 2) Permintaan tenaga kerja adalah konsep ekonomi yang mengacu pada jumlah total tenaga kerja yang ingin dan mampu dipekerjakan oleh perusahaan atau organisasi pada berbagai tingkat upah selama periode waktu tertentu.

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah, produktivitas tenaga kerja yang mana semakin produktif maka akan semakin banyak tenaga kerja yang ingin dipekerjakan Perusahaan, dan harga output karena semakin tinggi harga barang dan jasa yang diproduksi, semakin banyak tenaga yang ingin dipekerjakan perusahaan.

- 3) Upah keseimbangan (*equilibrium wage*) adalah tingkat upah dimana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta.
- 4) Penyerapan tenaga kerja penuh (*full employment*). Dalam model klasik, pasar tenaga kerja selalu cenderung mencapai penyerapan tenaga kerja penuh, dimana semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku dapat menemukan pekerjaan. Jika terdapat pengangguran, maka upah akan turun. Sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja dan menyerap pengangguran.

2.1.6 Elastisitas

2.1.6.1 Pengertian Elastisitas

Secara umum, elastisitas adalah konsep yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam suatu variabel ekonomi mempengaruhi variabel lainnya. Menurut Prathama Rahardja (2008), elastisitas atau analisis sensitivitas adalah analisis pengaruh satu variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu berapa persen satu variabel terikat akan berubah, bila satu variabel bebas berubah sebesar satu persen. Angka elastisitas (koefisien elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel terikat akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel bebas berubah satu persen. Menurut Purnomo

(2018), elastisitas diukur melalui rasio antara persentase perubahan faktor yang mempengaruhi jumlah barang tersebut.

Menurut Santoso (2017), elastisitas dapat dikategorikan berdasarkan nilainya, diantaranya :

1. Inelastisitas sempurna terjadi ketika nilai mutlak elastisitas $= 0$, ini berarti bahwa perubahan variabel X tidak memengaruhi variabel Y sama sekali. Dengan kata lain, nilai Y tetap konstan meskipun X berubah.
2. Inelastisitas terjadi jika nilai mutlak elastisitas < 1 , artinya perubahan pada nilai Y lebih kecil dibanding dengan perubahan pada nilai X. Dengan kata lain, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan nilai Y jika hanya bergantung pada variabel X.
3. Elastisitas uniter terjadi jika nilai mutlak elastisitas $= 1$, artinya persentase perubahan nilai Y akan sama besar dengan persentase perubahan nilai X, baik itu peningkatan maupun penurunan.
4. Elastisitas terjadi jika nilai mutlak elastisitas > 1 , artinya perubahan persentase pada variabel Y lebih besar dibandingkan dengan perubahan persentase pada variabel X.
5. Elastisitas sempurna terjadi jika nilai mutlak elastisitas $= \infty$, artinya menunjukan bahwa nilai Y selalu ada meskipun nilai X tidak ada.

2.1.6.2 Fungsi Elastisitas

Dalam penelitian, teori elastisitas digunakan untuk :

- Mengukur respons atau sensitivitas variabel Y terhadap perubahan dalam variabel X.

- Menyederhanakan interpretasi hasil, karena hasilnya berupa persentase, hal ini membuat hasilnya mudah dipahami, baik oleh akademisi maupun pembuat kebijakan.
- Membandingkan pengaruh antar variabel, karena elastisitas diukur dalam satuan persentase, jadi akan lebih mudah untuk membandingkannya.
- Membantu evaluasi kebijakan publik. Jika elastisitas kecil, maka kebijakan tersebut tidak cukup kuat dalam mempengaruhi variabel Y.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti selanjutnya. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi penulis.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Takasaping S.C , Tri Oldy Rotinsulu, Amran T. Naukoko (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe”	X = Pertumbuhan ekonomi dan Belanja Bantuan Sosial Y = Kemiskinan	X = PDRB Per Kapita	Pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 23, No. 10 November 2023
2	Heryan A (2024) “Pengaruh Penyaluran	X = Penyerapan tenaga kerja	X = Pengaruh Penyaluran Kredit,	Penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif	Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kredit, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat”	Y = Kemiskinan	Belanja Pemerintah Y = Pertumbuhan Ekonomi	signifikan terhadap kemiskinan	Daerah, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2024: 156-175
3	Putri R. Z, Muhammad Effendi (2021) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarmasin”	X = Pertumbuhan ekonomi dan belanja bantuan sosial Y = Kemiskinan	X = Kesempatan kerja	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan, belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 4 No. 2, 2021, hal 356-366 ISSN 2746-3249
4	Aini S. N , Ris Yuwono Yudo Nugroho (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”	X : Pertumbuhan ekonomi Y = Kemiskinan	X = Pendidikan, pengangguran , dan ketimpangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan	BuletinEkonomika Pembangunan https://journal.trunojoyo.ac.id/bep Vol.4 No.1 Februari 2023, hal 20-36 E-ISSN : 2807-4998 (online)
5	Adelia Wahyu Apriliana, Wiwin Priana Primandhana (2023) “Analisis Pengaruh Indeks	X = Penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi Y = Kemiskinan	X = Indeks pembangunan manusia	Penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif signifikan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif	Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur”			tidak signifikan terhadap kemiskinan.	
6.	Saman Fajriansyah, Ika Chandriyanti (2022) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan”	X = Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi Y = Kemiskinan	X = Tingkat pengangguran	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan sedangkan upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 5 No. 2, 2022, hal 558- 570 ISSN 2746- 3249
7	Putri E. M, Dewi Zaini Putri (2021) “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia”	X = Upah minimum Y = Kemiskinan	X = Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah	Upah minimum positif dan tidak signifikan, terhadap kemiskinan	Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Volume 10, Nomor 2, November 2021, Hal 106-114 P-ISSN: 2302- 8408; e-ISSN: 2655-6480
8	Utami I. T, Mohammad Rofiuddin (2022) “Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli	X = Upah minimum Y = Kemiskinan	X = belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah	Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Journal of Economics Research and Policy Studies, Vol 2, No. 3, Hal 145-160, E- ISSN: 2797- 8141

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim”				
9	Wiadnyana I. G. A. N. B, Sis Hadiyati (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”	X = Pertumbuhan ekonomi Upah Minimum Y = Kemiskinan	X = Pendidikan, Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, dan upah minimum memiliki pengaruh positif tidak signifikan	Jurnal Manajemen dan Sains, Vol 8, No.1, Tahun 2023, ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI 10.33087/jmas.v8i1.866
10	Dyah Puspitating Ayu, Prayudi Setiawan Prabowo (2021) “Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018”	X = Belanja bantuan sosial Y = Kemiskinan	X = Pendidikan dan tingkat pengangguran	Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan.	INDEPENDENT : Journal Of Economics E-ISSN: Page 170-185
11	Yustitia E, Arief Mulyawan Thoriq, Hamdan Ardiansyah (2022), “Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta Periode 2011 – 2020”	X = Penyerapan tenaga kerja Y = Kemiskinan	X = Laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial	Penyerapan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), Vol 6, No.1, Hal 43-52, p-ISSN: 2597-3665 e-ISSN: 2685-2837

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Pierre Fernic Engko, Muhamad Bugis, M. K. Tupamahu, Maryam Sangadji “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”	X = Belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi Y = Kemiskinan	X = Belanja subsidi	Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2024
13	Agustin L, Hadi Sumarsono (2022) “Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur”	X = Belanja bantuan sosial Y = Kemiskinan	X = Pengangguran dan IPM	Bantuan sosial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan	EKONIKA : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri ,Vol 7, No. 2, Tahun 2022, ISSN (Online) 2581-2157 ISSN (Print) 2502-9304
14	Nurainah (2019), “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan”	X = Belanja bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi Y = Kemiskinan	X = Kesempatan kerja	Belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Vol. 3, No. 2 April 2023 Page 649-657 E-ISSN: 2774-4221
15	Gusti Pratiwi, Safuridar, Martahadi (2022), “Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat	X = Belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi Y = Kemiskinan	X = Upah minimum provinsi dan penyerapan tenaga kerjac	Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol.1, No.4 Desember 2022, e-ISSN: 2961-788X; p-ISSN: 2961-7871, Hal 240-247

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemiskinan di Kabupaten Langkat''				

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Kerangka berpikir digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung. Sehingga, kerangka berpikir diartikan sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

2.2.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Terdapat beberapa pendapat oleh ahli mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Menurut Adam Smith, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal ini diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Dengan meningkatnya pemupukan modal, akan mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Mankiw menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan produksi sehingga lapangan kerja mengalami peningkatan. Peningkatan lapangan kerja ini dapat menstimulus perekonomian masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Perkembangan ini dapat berupa jumlah produksi barang industri yang bertambah, terjadinya perkembangan pada infrastruktur, jumlah sekolah yang bertambah, terjadinya peningkatan produksi sektor jasa dan peningkatan pada produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga akan membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri & Effendi (2021), pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Ananda Muhamad Tri Utama (2022) dan (Aini & Nugroho, 2023) pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Kemiskinan

Menurut ahli ekonomi Richard Freeman menyatakan bahwa upah minimum dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Richard freeman berargumen bahwa upah minimum yang lebih tinggi dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pekerja terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Maka, upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai instrument ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Upah minimum adalah jumlah upah paling rendah yang secara hukum harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya. Upah minimum ditetapkan pemerintah untuk memastikan pekerja bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, selain itu bertujuan agar perusahaan

tidak seenaknya membayar pekerja terlalu rendah, dan supaya ada keadilan dalam hubungan kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafri & Febrianti (2021), (Saman Fajriansyah, 2022), dan (Mahendra & Juardi, 2024) menyatakan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Belanja Bantuan Sosial dengan Kemiskinan

Seorang ahli ekonomi Martin Ravallion menekankan pentingnya efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. Ia berargumen bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, program bantuan sosial harus didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Ravallion juga menyoroti pentingnya pemantauan dan evaluasi program untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk memberikan bantuan langsung pada masyarakat yang tergolong kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Bantuan sosial ini sebagai bentuk kepedulian negara terhadap warganya yang butuh bantuan agar bisa tetap hidup layak dan tidak semakin kesulitan. Biasanya belanja bantuan sosial ini bisa dalam bentuk uang tunai, sembako, bantuan pendidikan, atau subsidi lain. Namun belanja bantuan sosial ini tidak bersifat mengikat, artinya bukan kewajiban negara / pemerintah selayaknya gaji PNS atau pensiun, namun lebih ke bentuk perhatian.

Berdasarkan penelitian Gusti Pratiwi (2022) belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan menurut Nurainah (2019) dan Rarun

(2018) menyatakan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

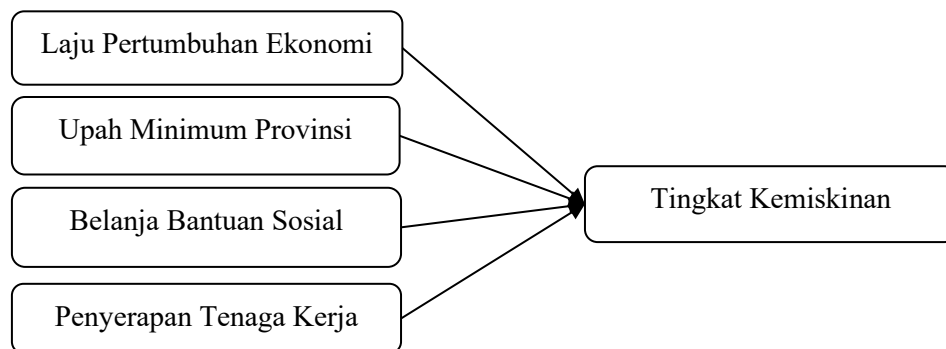
2.2.4 Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Kemiskinan

Amartya Sen berpendapat bahwa penyerapan tenaga kerja yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan, namun tetap harus disertai dengan penegakkan hak-hak dasar dan peningkatan kemampuan individu. Amartya Sen menekankan pentingnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sen juga berpendapat bahwa pekerjaan yang layak harus memberikan upah yang adil, kondisi kerja yang baik, dan perlindungan sosial. Dengan begitu maka akan meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga, yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Penyerapan tenaga kerja adalah proses dimana angkatan kerja yang tersedia di masyarakat bisa memperoleh pekerjaan diberbagai sektor, baik formal maupun nonformal. Penyerapan tenaga kerja dapat menunjukan seberapa besar kapasitas suatu negara, daerah, atau sektor usaha dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Semakin tinggi penyerapan tenaga kerja, artinya

Menurut Adelia Wahyu Apriliana (2023) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan menurut Pasaribu (2022) dan Vhernando (2024) penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibuat kerangka berpikir seperti berikut ini :



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga secara parsial laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2023.
2. Diduga secara simultan laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2023 .
3. Diduga kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, belanja bantuan sosial dan penyerapan tenaga kerja bersifat inelastis, sedangkan tingkat kemiskinan terhadap upah minimum provinsi bersifat elastis.